



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HJ SITI RAFIAH**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN ANATOMI**
3. NHK : **869667**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.235.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 2.201 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 59 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 376.500.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOTOR, VOLTA 401A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.138.678.535
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.750.178.535
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.750.178.535

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.